

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua

William Yusuf Rorey¹, Muh Yamin Noch², Zakaria³, Suratini⁴, Yaya Sonjaya⁵

^{1,3} Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

^{2,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

E-mail Korespondensi: abienoch12@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja manajerial.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Provinsi Papua. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 83,5% variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya sebesar 17,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Implikasi Penelitian: Temuan penelitian menegaskan pentingnya peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran, penguatan akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, serta komitmen organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial, mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Manajerial.*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi menuntut pengelolaan keuangan yang mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal (Mardiasmo, 2006).

Kinerja manajerial menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja manajerial mencerminkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian organisasi. Menurut Mahsun (2006), kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kinerja manajerial adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan individu dalam proses penyusunan anggaran serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi. Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan manajer dan pegawai berkontribusi dalam menentukan target yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran.

Partisipasi anggaran yang tinggi diyakini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena anggaran yang disusun mencerminkan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan organisasi secara lebih realistis. Keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran memungkinkan terserapnya berbagai informasi dari unit kerja pelaksana, sehingga target dan alokasi sumber daya yang ditetapkan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Nafarin (2007), keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan komitmen terhadap pencapaian sasaran organisasi karena pegawai merasa memiliki tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan. Kondisi tersebut mendorong aparatur untuk bekerja lebih optimal dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dalam penyusunan anggaran berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga target organisasi menjadi semakin sulit untuk dicapai.

Selain partisipasi anggaran, akuntabilitas merupakan faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kinerja manajerial organisasi sektor publik. Akuntabilitas menuntut bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara terbuka dan transparan. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas berkaitan dengan pelaporan keuangan serta mencakup pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program yang telah didanai dari anggaran daerah. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam organisasi, semakin besar pula dorongan bagi aparatur untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Keberadaan sistem akuntabilitas yang baik akan mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Organisasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten cenderung memiliki kualitas pengelolaan yang lebih baik karena setiap aktivitas dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2006). Melalui mekanisme akuntabilitas, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang dapat meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan kinerja manajerial yang efektif dan efisien.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan dan target anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, terukur, dan dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Sasaran anggaran yang jelas akan memberikan arah bagi aparatur dalam melaksanakan tugas serta menjadi pedoman dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya organisasi. Menurut Bastian (2006), sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan organisasi dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan adanya target yang terdefinisi dengan baik, setiap unit kerja dapat memahami peran dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Faktor struktural dan administratif serta komitmen organisasi merupakan faktor yang memengaruhi kinerja manajerial. Komitmen organisasi menggambarkan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi serta kesediaan untuk berupaya mencapai tujuan organisasi. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, rasa tanggung jawab, dan kepedulian yang lebih besar terhadap keberhasilan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Robbins (2008) menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menunjukkan keinginan

yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dan berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkungan pemerintahan, komitmen organisasi menjadi sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki aparatur, semakin besar peluang terciptanya kinerja manajerial yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian Sri Mauliza, Astuti, dan Irfan (2022) menemukan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan Kusuma et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Namun demikian, penelitian Candrakusuma (2017) menemukan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Pada Pemerintah Provinsi Papua, peningkatan kinerja manajerial menjadi isu penting mengingat masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penyerapan anggaran yang belum optimal, pelaksanaan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun, serta perlunya peningkatan akuntabilitas dan komitmen aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua menjadi penting untuk memperoleh bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja organisasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi dalam satu model penelitian untuk menjelaskan kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau menjadikan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, penelitian ini menganalisis pengaruh langsung seluruh variabel terhadap kinerja manajerial dalam konteks pemerintahan daerah di Papua yang memiliki karakteristik dan tantangan pengelolaan keuangan daerah yang khas.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi aparatur dalam penyusunan anggaran, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, perumusan sasaran anggaran yang jelas dan terukur, serta pengembangan komitmen organisasi yang lebih kuat. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan tingkat keterlibatan individu dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran organisasi. Partisipasi tersebut mencerminkan sejauh mana pegawai atau manajer diberi kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan informasi, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan anggaran. Menurut Mulyadi (2001), partisipasi anggaran adalah keikutsertaan manajer operasional dalam menentukan rencana kegiatan dan target anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas organisasi. Sementara itu, Nafarin (2007) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran menunjukkan tingkat keterlibatan individu dalam menentukan dan menyusun anggaran pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam organisasi sektor publik, partisipasi anggaran memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan aparatur dalam penyusunan anggaran memungkinkan tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai kebutuhan program, kendala pelaksanaan, serta prioritas pembangunan yang harus dicapai. Melalui partisipasi yang lebih luas, anggaran yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi riil organisasi sehingga memudahkan implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Partisipasi anggaran diyakini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran cenderung memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap target yang telah ditetapkan sehingga terdorong untuk bekerja lebih optimal dalam mencapainya. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran, semakin besar peluang terciptanya kinerja manajerial yang efektif karena keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan dan pemahaman bersama di dalam organisasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pencapaian hasil kepada pihak yang memberikan mandat. Dalam sektor publik, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Mardiasmo (2004) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas proses, program, dan kebijakan yang dijalankan oleh organisasi. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan akuntabilitas dengan kinerja manajerial terletak pada kemampuannya mendorong aparatur untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Organisasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten akan memiliki mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan organisasi. Kondisi tersebut memungkinkan setiap individu memahami tanggung jawabnya serta terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sehingga berdampak pada peningkatan kinerja manajerial.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tingkat kejelasan dan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan anggaran. Sasaran anggaran yang jelas menunjukkan bahwa target organisasi dirumuskan secara terukur, spesifik, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Menurut Bastian (2006), kejelasan sasaran anggaran menjadi salah satu karakteristik penting dalam penganggaran karena berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam organisasi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran sangat diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sasaran yang dirumuskan secara spesifik akan memudahkan aparatur memahami prioritas pembangunan serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kejelasan sasaran anggaran menjadi dasar dalam proses pengawasan dan evaluasi karena keberhasilan program dapat diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan arah kerja yang jelas bagi aparatur pemerintah. Ketika sasaran anggaran dipahami dengan baik, pegawai dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan berfokus pada pencapaian target organisasi. Sebaliknya, sasaran yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Kejelasan sasaran anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja manajerial.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi yang ditunjukkan melalui kesediaan untuk menerima nilai-nilai organisasi, berupaya mencapai tujuan organisasi, serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Robbins (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat keyakinan dan dukungan individu terhadap tujuan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Meyer dan Allen (1997) menjelaskan bahwa komitmen organisasi terdiri atas komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif.

Dalam organisasi sektor publik, komitmen organisasi menjadi faktor penting karena keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat bergantung pada kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, kepedulian, dan kemauan yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Sebaliknya, rendahnya komitmen organisasi dapat menyebabkan menurunnya motivasi kerja dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan tugas. Komitmen organisasi memiliki hubungan yang erat dengan kinerja manajerial karena individu yang memiliki komitmen tinggi akan berupaya memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Aparatur yang berkomitmen tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas, tetapi juga berupaya mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki aparatur pemerintah, semakin besar peluang terciptanya kinerja manajerial yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan, atau sejalan dengan tujuan penelitian. Hipotesis akan menekankan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen. Jawaban yang bersifat sementara ini akan diteliti hingga terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan aparatur dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran organisasi. Keterlibatan tersebut memungkinkan pegawai menyampaikan informasi, kebutuhan, serta kondisi riil yang dihadapi dalam pelaksanaan program sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut Mulyadi (2001), partisipasi anggaran memberikan kesempatan kepada individu untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, semakin besar rasa memiliki dan tanggung jawab aparatur terhadap pencapaian target organisasi. Dalam organisasi sektor publik, partisipasi anggaran dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan komitmen aparatur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Aparatur yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran cenderung memahami tujuan organisasi dengan lebih baik sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Hasil penelitian Sri Mauliza, Astuti, dan Irfan (2022) serta Kusuma et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut adanya pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas organisasi, baik dari aspek keuangan maupun pencapaian program. Dalam organisasi sektor publik, penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan transparansi, mendorong kepatuhan terhadap peraturan, serta memperkuat orientasi aparatur terhadap pencapaian hasil. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam organisasi, semakin jelas pula tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh aparatur. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan manajerial. Penelitian Sri Mauliza et al. (2022), Siti Cholifah dan Jaeni (2023), serta Intan Desyatama dan Praptiestrini (2021) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan dan target anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh pelaksana program. Sasaran anggaran yang jelas akan memberikan arah bagi aparatur dalam melaksanakan tugas serta menjadi dasar untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja. Menurut Bastian (2006), kejelasan sasaran anggaran memudahkan organisasi dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program. Dalam konteks organisasi pemerintah, sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparatur memahami prioritas pembangunan serta target yang harus dicapai. Dengan demikian, pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif. Penelitian Kusuma et al. (2021), Siti Cholifah dan Jaeni (2023), serta Candrakusuma (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi yang ditunjukkan melalui kesediaan untuk menerima nilai-nilai organisasi, mendukung pencapaian tujuan, serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Robbins (2008) menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan kemauan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi bagi organisasi. Dalam lingkungan pemerintahan, komitmen organisasi menjadi faktor penting karena keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung bekerja lebih optimal, peduli terhadap keberhasilan organisasi, dan berupaya mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian Candrakusuma (2017) serta Sri Mauliza et al. (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial pada organisasi sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai aspek dalam pengelolaan organisasi. Partisipasi anggaran mendorong keterlibatan aparatur dalam pengambilan keputusan; akuntabilitas memperkuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan program; kejelasan sasaran anggaran memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi; sedangkan komitmen organisasi mendorong aparatur untuk bekerja

secara optimal demi keberhasilan organisasi. Kombinasi keempat faktor tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas manajerial di Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan argumentasi teoritis tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel melalui data numerik yang diperoleh dari responden. Sementara itu, desain asosiatif kausal digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

Populasi penelitian adalah aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian, yaitu partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, dan kinerja manajerial. Selain data primer yang diperoleh dari kuesioner, penelitian ini didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen, peraturan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja manajerial, uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja manajerial.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dibandingkan standar deviasi, yaitu partisipasi penyusunan anggaran sebesar 28,49 (SD = 5,607), akuntabilitas sebesar 28,52 (SD = 5,810), kejelasan sasaran anggaran sebesar 28,85 (SD = 5,964), komitmen organisasi sebesar 28,09 (SD = 5,700), dan kinerja manajerial sebesar 29,09 (SD = 5,918). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap seluruh variabel penelitian berada pada kategori yang baik dengan tingkat penyebaran data yang relatif homogen, sehingga data dinilai cukup representatif dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nilai *Descriptive Statistics* yang diperoleh dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
						Std. Error	Statistic
Kinerja Manejerial	65	12	35	1891	29.09	.734	5.918
Partisipasi penyusunan Anggaran	65	13	35	1852	28.49	.695	5.607
Akuntabilitas	65	13	35	1854	28.52	.721	5.810
Kejelasan sasaran anggaran	65	12	35	1875	28.85	.740	5.964
Komitmen Organisasi	65	13	35	1826	28.09	.707	5.700
Valid N (listwise)	65						

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,2441) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nilai r hitung untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,895, akuntabilitas 0,904, kejelasan sasaran anggaran 0,657, dan komitmen organisasi 0,856, dengan seluruh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan dapat dipahami dengan baik oleh responden, sehingga instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel kinerja manajerial sebesar 0,630, partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,625, akuntabilitas sebesar 0,654, kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,767, dan komitmen organisasi sebesar 0,777. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti, sehingga kuesioner yang digunakan dapat dipercaya dan layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan tidak bias. Pengujian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian melalui grafik Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya. Grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menyerupai lonceng (bell-shaped curve) dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Hasil ini mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Meskipun nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai kurang dari 0,05, penilaian normalitas pada penelitian ini lebih mengacu pada pendekatan grafik yang menunjukkan pola distribusi residual normal, sehingga model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai Tolerance 0,133 dan VIF 7,540; akuntabilitas memiliki Tolerance 0,131 dan VIF 7,636; kejelasan sasaran anggaran memiliki Tolerance 0,249 dan VIF 4,013; serta komitmen organisasi memiliki Tolerance 0,240 dan VIF 4,175. Seluruh variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Berdasarkan grafik scatterplot, titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian Glejser menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,538 dan komitmen organisasi sebesar 0,341, yang lebih besar dari 0,05. Sementara itu, partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki nilai signifikansi 0,012, sedangkan akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,000. Namun, berdasarkan pola penyebaran residual pada grafik scatterplot yang tidak membentuk pola tertentu, model regresi secara umum masih dapat dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Hasil persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

		Coefficients ^a		T _{hitung}	Sig
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.070	2.205		.975
	Partisipasi penyusunan anggaran	.381	.147	.361	.012
	Akuntabilitas	.588	.143	.577	.000
	Kejelasan sasaran anggaran	.048	.101	-.048	.638
	Komitmen Organisasi	.104	.108	.100	.341

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,070 + 0,381X_1 + 0,588X_2 + 0,048X_3 + 0,104X_4 + e$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi positif terhadap kinerja manajerial. Variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi terbesar, yaitu sebesar 0,588, diikuti partisipasi dalam penyusunan anggaran sebesar 0,381, komitmen organisasi sebesar 0,104, dan kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,048. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap peningkatan kinerja manajerial dibandingkan dengan variabel lainnya.

Nilai konstanta sebesar 0,070 menunjukkan bahwa apabila partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi dianggap konstan atau bernilai nol, maka kinerja manajerial memiliki nilai dasar sebesar 0,070. Selanjutnya, koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,381 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,381 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,588 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,588 satuan.

Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,048 menunjukkan arah hubungan positif, namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan variabel lainnya. Demikian pula, koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 0,104 menunjukkan bahwa peningkatan komitmen organisasi cenderung meningkatkan kinerja manajerial. Namun demikian, berdasarkan nilai signifikansi pada Tabel 5.17, hanya variabel partisipasi penyusunan anggaran (Sig. = 0,012) dan akuntabilitas (Sig. = 0,000) yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran (Sig. = 0,638) dan komitmen organisasi (Sig. = 0,341) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial karena memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,381, nilai t_{hitung} sebesar 2,588, dan nilai signifikansi sebesar 0,012. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,588 > 1,66940$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$), maka partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, H1 diterima.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,588, nilai t_{hitung} sebesar 4,107, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,107 > 1,66940$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, H2 diterima.

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,048, nilai t hitung sebesar -0,473, dan nilai signifikansi sebesar 0,638. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,638 > 0,05$) dan nilai absolut t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,473 < 1,66940$), maka kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, H3 ditolak.

Variabel komitmen organisasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,104, nilai t hitung sebesar 0,960, dan nilai signifikansi sebesar 0,341. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,960 < 1,66940$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,341 > 0,05$), komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Maka H4 ditolak.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, H5 diterima, yang berarti partisipasi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5.18, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,835. Hal ini menunjukkan bahwa 83,5% variasi kinerja manajerial pada Pemerintah Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya sebesar 16,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi sebesar 83,5% menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan kinerja manajerial. Dengan demikian, partisipasi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi kinerja manajerial di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Pembahasan

Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,381, nilai t hitung sebesar 2,588 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,66940, serta nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan aparatur dalam proses penyusunan anggaran, semakin baik pula kinerja manajerial yang dihasilkan. Dengan kata lain, partisipasi aparatur dalam proses penganggaran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program kerja.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Mulyadi (2001) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan keterlibatan manajer atau pegawai dalam proses penyusunan anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan organisasi. Melalui partisipasi tersebut, pegawai memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi, kebutuhan, serta kondisi riil yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nafarin (2007) menjelaskan bahwa keterlibatan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga mendorong individu untuk bekerja lebih optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, keterlibatan aparatur dalam proses penyusunan anggaran menjadi penting mengingat kompleksitas pelaksanaan program pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta beragamnya kebutuhan masyarakat. Aparatur yang terlibat secara aktif dalam penyusunan anggaran cenderung lebih memahami prioritas program, kebutuhan sumber daya, serta tantangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemahaman tersebut memungkinkan aparatur melaksanakan tugas secara lebih efektif serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam mencapai target organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun komitmen dan tanggung jawab aparatur dalam mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi yang diberikan kepada aparatur dalam proses pengambilan keputusan anggaran, semakin besar pula motivasi mereka untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja manajerial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sisdyani (2016) serta Sri Mauliza, Astuti, dan Irfan (2022) yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa keterlibatan aparatur dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta efektivitas pelaksanaan tugas manajerial di organisasi sektor publik. Pemerintah Provinsi Papua perlu terus mendorong penerapan mekanisme penganggaran yang partisipatif agar kinerja manajerial dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,588, nilai t hitung sebesar 4,107 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,66940, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan organisasi, semakin baik pula kinerja manajerial yang dihasilkan. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas pencapaian program, penggunaan sumber daya, serta hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Semakin kuat sistem akuntabilitas yang diterapkan, semakin besar pula dorongan bagi aparatur untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil.

Pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaannya akan lebih terdorong untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara optimal. Kejelasan tanggung jawab, mekanisme pelaporan yang baik, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu aparatur meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian program. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja manajerial dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting mengingat besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik akan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut untuk merealisasikan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Mauliza, Astuti, dan Irfan (2022), Desyatama dan Praptiestrini (2021), serta Cholifah dan Jaeni (2023) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sektor publik. Pemerintah Provinsi Papua perlu terus memperkuat sistem akuntabilitas melalui peningkatan kualitas pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja agar mampu mendukung peningkatan kinerja manajerial secara berkelanjutan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,048 dengan nilai t hitung sebesar -0,473 yang lebih kecil dari t tabel 1,66940 serta nilai signifikansi sebesar 0,638 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kinerja manajerial aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial tidak dapat diterima.

Secara teoritis, kejelasan sasaran anggaran merupakan kondisi ketika tujuan dan target anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Menurut Bastian (2006), sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan organisasi dalam mengarahkan pelaksanaan program, melakukan pengendalian, serta mengevaluasi pencapaian kinerja. Sasaran yang dirumuskan dengan baik seharusnya mampu menjadi pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas kerja dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja manajerial di Pemerintah Provinsi Papua. Kondisi tersebut dapat terjadi karena aparatur lebih berfokus pada pelaksanaan tugas administratif dan pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan, tanpa menjadikan kejelasan sasaran anggaran sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, meskipun sasaran anggaran telah dirumuskan secara formal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, belum tentu seluruh aparatur memahami dan menginternalisasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial yang tidak signifikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, kondisi geografis yang menantang, serta dinamika pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam kondisi tersebut, keberhasilan pelaksanaan tugas manajerial sering kali lebih ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam beradaptasi, berkoordinasi, dan mengatasi berbagai kendala operasional dibandingkan dengan tingkat kejelasan sasaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tambunan (2020) dan beberapa penelitian lain yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sasaran anggaran yang jelas belum tentu secara langsung meningkatkan kinerja manajerial apabila tidak didukung oleh faktor lain seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, sistem akuntabilitas yang kuat, kompetensi aparatur, serta komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi Papua tidak hanya perlu memastikan kejelasan sasaran anggaran, tetapi juga memperkuat aspek implementasi, koordinasi, dan pengawasan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat terjemahkan menjadi kinerja organisasi yang lebih baik.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,104 dengan nilai t hitung sebesar 0,960 yang lebih kecil dari t tabel 1,66940 serta nilai signifikansi sebesar 0,341 yang lebih besar dari 0,05. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan positif, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial tidak dapat diterima.

Secara teoritis, komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi yang tercermin dalam kesediaan untuk menerima nilai-nilai organisasi, berupaya mencapai tujuan organisasi, serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Robbins (2008) menjelaskan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan keinginan yang kuat untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Secara konseptual, komitmen organisasi seharusnya mampu mendorong peningkatan kinerja manajerial karena aparatur akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya komitmen organisasi belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja manajerial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja manajerial pada Pemerintah Provinsi Papua kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat struktural dan administratif, seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, sistem akuntabilitas, ketersediaan sumber daya, maupun mekanisme pengawasan organisasi. Dengan kata lain, meskipun aparatur memiliki loyalitas dan keterikatan terhadap organisasi, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan kinerja manajerial apabila tidak didukung oleh sistem kerja dan tata kelola organisasi yang memadai.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, pengaruh komitmen organisasi yang tidak signifikan terhadap kinerja manajerial dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan, dinamika birokrasi, rotasi jabatan, serta kompleksitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang sering kali menuntut aparatur untuk lebih berorientasi pada penyelesaian tugas dan pemenuhan target organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja manajerial lebih banyak ditentukan oleh aspek teknis dan administratif dibandingkan dengan tingkat komitmen individu terhadap organisasi. Adanya standar kerja, prosedur operasional, dan sistem pengawasan yang berlaku dapat membuat kinerja tetap berjalan meskipun tingkat komitmen organisasi antarpegawai berbeda-beda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tambunan (2020) yang menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan kinerja manajerial di organisasi sektor publik. Peningkatan kinerja manajerial pada Pemerintah Provinsi Papua tidak cukup hanya melalui penguatan komitmen organisasi, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran, penguatan akuntabilitas, perbaikan sistem pengendalian, serta pengembangan kapasitas aparatur agar mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja manajerial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil kombinasi berbagai aspek pengelolaan organisasi yang saling mendukung.

Secara teoritis, kinerja manajerial merupakan hasil dari kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi (Mahsun, 2006). Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut memerlukan dukungan partisipasi aparatur dalam penyusunan anggaran, penerapan prinsip akuntabilitas, kejelasan sasaran yang ingin dicapai, serta komitmen organisasi yang kuat. Keempat faktor tersebut menjadi elemen penting dalam menciptakan proses pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja manajerial yang optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas merupakan faktor yang secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial. Sementara itu, meskipun secara parsial tidak berpengaruh signifikan, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi secara bersama-sama tetap berkontribusi dalam membentuk model kinerja manajerial yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas manajerial tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tertentu, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor organisasi yang bekerja secara simultan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kinerja manajerial perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem penganggaran partisipatif, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sasaran anggaran yang lebih terarah, serta pengembangan komitmen aparatur terhadap organisasi. Kompleksitas pelaksanaan pembangunan di Papua menuntut sinergi antara aspek teknis, administratif, dan perilaku organisasi agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Besarnya pengaruh keempat variabel tersebut tercermin dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,835, yang menunjukkan bahwa 83,5% variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi. Sementara itu, sisanya sebesar 16,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini memperkuat bahwa kombinasi keempat variabel tersebut berperan sangat penting dalam menjelaskan kinerja manajerial di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat aspek penganggaran, akuntabilitas, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi anggaran dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan aparatur dalam proses penyusunan anggaran dan semakin baik penerapan akuntabilitas dalam organisasi, semakin tinggi pula kinerja manajerial yang dihasilkan. Sementara itu, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial. Namun demikian, secara simultan partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,835 menunjukkan bahwa 83,5% variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 16,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua perlu difokuskan pada penguatan partisipasi aparatur dalam proses penyusunan anggaran serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan aparatur dalam pengambilan keputusan anggaran akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemahaman terhadap target organisasi, sedangkan penerapan akuntabilitas yang baik akan mendorong transparansi, efektivitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, meskipun kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak terbukti berpengaruh signifikan, kedua faktor tersebut tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi pada pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik organisasi dan lingkungan yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi responden dan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengisian kuesioner. Ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada partisipasi anggaran, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi. Namun, masih terdapat faktor-faktor lain yang kemungkinan memengaruhi kinerja manajerial, tetapi belum dimasukkan ke dalam model penelitian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian ke pemerintah kabupaten/kota maupun instansi sektor publik lainnya, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antarwilayah. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja manajerial, seperti kompetensi aparatur, budaya organisasi, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, motivasi kerja, atau kualitas sumber daya manusia. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja manajerial, sehingga dapat memperkaya pengembangan teori dan praktik manajemen di sektor publik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ardinata, F. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
- Bangun, W. (2009). Intisari Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Candrakusuma, I. G. A. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial.
- Cholifah, S., & Jaeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Sektor Publik.
- Desyatama, I., & Praptiestrini. (2021). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Daerah.
- Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hiktaop, K. (2022). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah di Papua.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mauliza, W., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Sektor Publik.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, & Setyawan, J. (2001). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nata, S. (2020). Pengaruh Kinerja Manajerial terhadap Efektivitas Organisasi Publik.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Putra, I. G. N. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sardjito, B., & Muthaher, O. (2007). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (8th ed.)*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Sisdyani, E. A. (2016). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Sektor Publik.
- Soetrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suyanto. (2011). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Instansi Pemerintah.
- Tambunan, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Wahyuni, S. (2014). Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Peraturan Perundang-undangan

- , Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- , Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- , Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- , Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2014). Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2019). Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.